

BAB 3

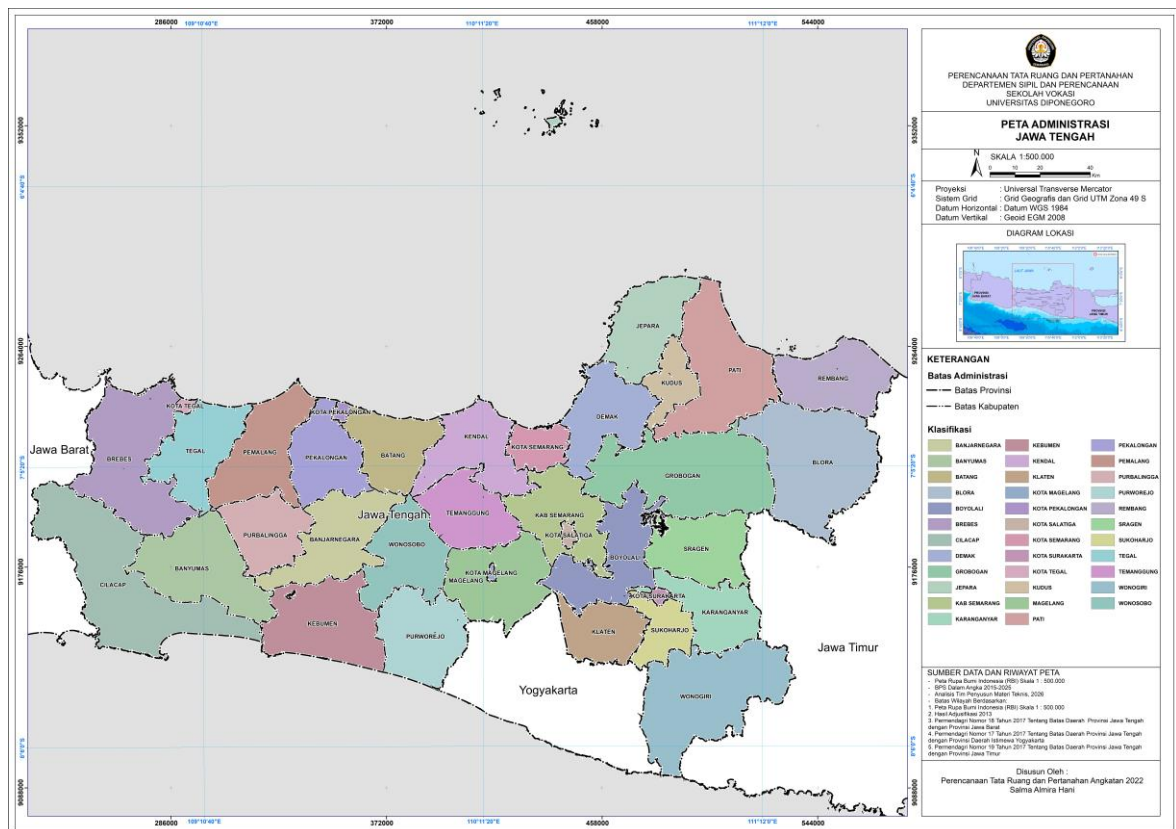
PROFIL JAWA TENGAH

3.1 Gambaran Wilayah

Gambaran umum wilayah daalam penelitian ini menjabarkan dengan identifikasi kondisi geografis dan demografis yang terdapat di Jawa Tengah.

3.2 Kondisi Geografis

Berdasarkan astronomis, Jawa Tengah terletak diantara $5^{\circ}40'$ dan $8^{\circ}30'$ Lintang Selatan dan antara $108^{\circ}30'$ dan $111^{\circ}30'$ Bujur Timur (termasuk Pulau Karimunjawa). Jarak terjauh dari barat ke timur adalah 263 km dan dari utara ke selatan 226 km (tidak termasuk Pulau Karimunjawa).



Sumber: Rupa Bumi Indonesia, 2019

Gambar 3.2.1 Peta Administrasi Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah berdasarkan stasiun klimatologi tahun 2024 memiliki Klas 1 Semarang, suhu udara dengan rata-rata berkisar pada $28,2^{\circ}\text{C}$ sampai dengan $30,0^{\circ}\text{C}$. Tempat yang letaknya berdekatan dengan pantai mempunyai suhu udara rata-rata relatif tinggi. Kelembaban udara rata-rata bervariasi, dari 67 persen sampai dengan 84 persen. Curah hujan

tertinggi tercatat di Stasiun Geofisika Banjarnegara yaitu sebesar 3.413,7 mm³, sedangkan hari hujan terbanyak tercatat di Stasiun Meteorologi Cilacap sebanyak 220 hari.

Menurut data geografis Jawa Tengah memiliki topografi dengan bentang alam yang beragam seperti dataran pesisir yang berada di daerah utara dengan kondisi datar dan menjadi area interaktif bagi logistik dan industri. Daerah dataran tinggi dan pegunungan vulkanik yang berada pada daerah Dieng, Merapi, dan Merbabu, yang dijadikan sebagai sentra holtikultura dan wisata. Pegunungan aktif yang berada di daerah Selatan dengan potensi untuk bencana alam seperti longsor, banjir, dan letusan gunung api.

Daerah Jawa Tengah berdasarkan BPS memiliki luasan mencapai 34.337,49km yang terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota dengan rincian luas wilayah sebagai berikut.

Tabel 3.1 Luasan Wilayah Berdasarkan Kota/Kabupaten Jawa Tengah

No.	Kabupaten/Kota	Ibu Kota Kabupaten/Kota	Luas Total Area (km ²)
1	Cilacap	Cilacap	2.323,93
2	Banyumas	Purwokerto	1.391,15
3	Purbalingga	Purbalingga	805,76
4	Banjarnegara	Banjarnegara	1.144,90
5	Kebumen	Kebumen	1.334,10
6	Purworejo	Purworejo	1.081,97
7	Wonosobo	Wonosobo	1.011,62
8	Magelang	Mungkid	1.129,98
9	Boyolali	Boyolali	1.096,59
10	Klaten	Klaten	701,50
11	Sukoharjo	Sukoharjo	493,53
12	Wonogiri	Wonogiri	1.905,75
13	Karanganyar	Karanganyar	803,05
14	Sragen	Sragen	994,57
15	Grobogan	Purwodadi	2.023,85
16	Blora	Blora	1.957,29
17	Rembang	Rembang	1.037,54
18	Pati	Pati	1.527,90
19	Kudus	Kudus	447,45
20	Jepara	Jepara	1.020,25
21	Demak	Demak	977,77
22	Semarang	Ungaran	1.019,27
23	Temanggung	Temanggung	864,83
24	Kendal	Kendal	1.008,12
25	Batang	Batang	857,27

No.	Kabupaten/Kota	Ibu Kota Kabupaten/Kota	Luas Total Area (km ²)
26	Pekalongan	Kajen	892,91
27	Pemalang	Pemalang	1.137,41
28	Tegal	Slawi	983,90
29	Brebes	Brebes	1.742,81
Kota			
30	Magelang	Magelang	18,56
31	Surakarta	Surakarta	46,72
32	Salatiga	Salatiga	54,98
33	Semarang	Semarang	370,00
34	Pekalongan	Pekalongan	46,20
35	Tegal	Tegal	39,08

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Menurut BPS luas area yang paling tinggi berada di Kabupaten Cilacap dengan total luas area 2.323,93km² dan Kabupaten Grobogan dengan luas area 2.023,85 km².

3.3 Peran PDRB di Jawa Tengah

Berdasarkan BPS 2025 untuk menunjukkan perkembangan ekonomi daerah di setiap tahunnya berdasarkan data PDRB. BPS mengidentifikasi menjadi jumlah nilai tambah barang yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi pada wilayah tertentu dalam kurun waktu satu tahun. PDRB memiliki dua pendekatan yang digunakan yaitu DRB atas dasar harga berlaku Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) untuk melihat besaran nilai ekonomi, dan PDRB atas dasar harga konstan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) untuk mengukur pertumbuhan riil dari tahun ke tahun. Provinsi Jawa Tengah termasuk salah satu provinsi terbesar di Indonesia, dengan peran PDRB-nya yang menempati peringkat keempat dalam kontribusi terhadap perekonomian nasional selama periode 2021–2025.

Tabel 3.2 PDRB Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota 2021-2025

Kabupaten/Kota	Menurut Lapangan Usaha (Miliar rupiah)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Kab. Cilacap	109653,60	121021,80	132469,38	13624,58	142706,51
Kab. Banyumas	56919,82	62817,29	68771,32	74320,29	79803,56
Kab. Purbalingga	26393,81	28823,62	31210,85	33444,66	36070,88
Kab. Banjarnegara	22827,89	24996,48	27198,09	29278,80	31351,51
Kab. Kebumen	29563,14	32614,64	35780,45	38628,96	41520,57
Kab. Purworejo	19602,72	21352,54	23187,67	24823,84	26483,56
Kab. Wonosobo	19856,86	21587,23	23329,22	25043,56	26743,57

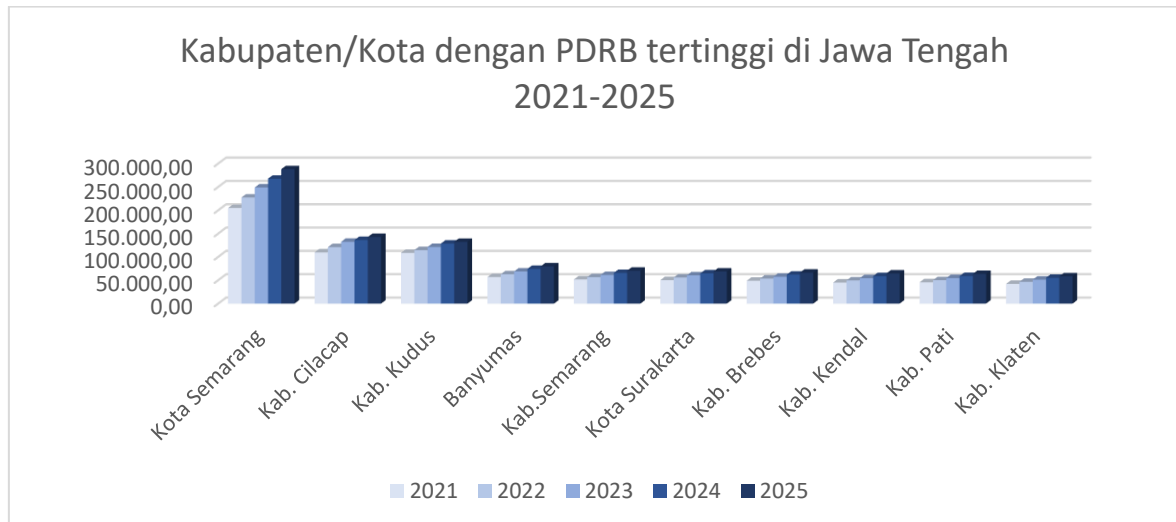
Kabupaten/Kota	Menurut Lapangan Usaha (Miliar rupiah)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Kab. Magelang	34176,31	37431,61	40652,41	43730,94	46981,50
Kab. Boyolali	34896,96	38788,25	42715,20	45862,24	48841,47
Kab. Klaten	42271,26	46591,61	51249,60	55244,33	58434,97
Kab.Sukoharjo	38990,46	42780,63	46479,60	49928,42	53489,29
Kab. Wonogiri	30581,45	33692,20	36960,76	39863,14	42816,58
Kab. Karanganyar	39157,21	43087,76	47150,65	51123,06	55089,00
Kab. Sragen	40087,78	44242,88	48554,08	52423,47	56179,21
Kab.Grobogan	28815,02	31806,89	34760,13	37520,10	40143,91
Kab. Blora	26928,61	30937,30	31729,13	33230,43	35239,01
Kab. Rembang	20071,10	22107,21	24126,18	25805,85	27709,76
Kab. Pati	45565,94	50188,82	54755,93	59071,52	63627,13
Kab. Kudus	108724,52	114559,63	121351,89	128629,51	132316,91
Kab. Jepara	32045,70	35036,38	38038,82	40554,95	43448,83
Kab. Demak	27649,98	30252,47	33016,20	35475,89	38778,51
Kab. Semarang	51796,32	56609,22	61278,81	65684,64	70391,63
Kab. Ternanggung	22627,79	24726,44	26894,92	28928,20	31204,37
Kab. Kendal	45164,80	49661,96	54355,48	58855,38	64590,80
Kab. Batang	23125,76	25443,55	27879,12	30421,79	33370,61
Kab.Pekalongan	24030,30	25962,59	28166,43	30352,10	32684,21
Kab. Pemalang	27443,89	29915,42	32343,23	34922,77	37496,54
Kab. Tegal	37334,99	40770,33	44435,71	47826,44	51416,47
Kab. Brebes	48966,24	53647,59	57505,87	62047,04	66309,53
Kota Magelang	9178,75	10073,48	10987,98	11826,06	12706,22
Kota Surakarta	50371,56	55848,55	60529,60	64691,67	68789,17
Kota Salatiga	14008,91	15381,49	16770,34	18080,61	19384,47
Kota Semarang	2048,71	227373,36	248854,03	267615,65	288050,38
Kota Pekalongan	11460,58	12590,98	13737,76	14766,38	15901,56
Kota Tegal	16017,04	17679,91	19162,24	20663,25	22247,69
Total	1218355,78	1560402,11	1696389,08	1694310,52	1942319,89

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Berdasarkan Tabel 3.5 total PDRB Jawa Tengah mengalami tren pertumbuhan yang cenderung konsisten. Pada tahun 2021, jumlah PDRB provinsi sebesar Rp1.218.355,78 triliun kemudian terjadi peningkatan menjadi Rp1.560.402,11 triliun (2022), Rp 1.560.402,11 triliun (2023), pada tahun 2024 sebesar Rp1.694.310,52 triliun dan tahun 2025 sebesar Rp 1.942.319,89. Pertumbuhan ini mengindikasikan pemulihan dan ekspansi ekonomi yang berkelanjutan pasca pandemi.

Di antara 35 kabupaten/kota, terdapat pertumbuhan PDRB yang cukup mencolok. Kota Semarang mendominasi sebagai kontributor PDRB terbesar, dengan nilai mencapai

Rp288.050,38 triliun pada tahun 2025. Posisi kedua ditempati Kab. Cilacap Rp142.706,51triliun, diikuti Kab. Kudus Rp 132.316,91 triliun. Sebaliknya, daerah dengan kontribusi PDRB terkecil adalah Kota Salatiga (Rp19.384,47 triliun), Kota Pekalongan (Rp 15.01,56triliun), dan Kota Magelang (Rp 12.706,22) pada tahun 2025. Berikut visualisasi 10 Kabupaten/Kota dengan nilai PDRB tertinggi.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Gambar 3.3.1 Kabupaten/Kota Dengan PDRB Tertinggi di Jawa Tengah 2021-2025

Dominasi Kota Semarang sebagai ibu kota provinsi menggambarkan fungsinya akan pusat aktivitas ekonomi, perdagangan, dan jasa di Jawa Tengah. Sementara itu, kabupaten/kota dengan basis sektor utamanya industri yang kuat seperti Cilacap (industri pengolahan dan migas) dan Kudus (industri rokok dan farmasi) turut menyumbang PDRB yang signifikan.

3.4 Ketersediaan Fasilitas Pelayanan

Ketersediaan fasilitas guna pelayanan, berperan penting dalam fungsi sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam suatu wilayah, baik kawasan, perkotaan, maupun regional. Ketersediannya menentukan perencanaan tata ruang yang diterapkan.

3.4.1 Fasilitas Sosial

Fasilitas sosial merupakan fasilitas yang disediakan pemerintah atau swasta untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat dalam kehidupan sosial sebagai bentuk pelayanan umum yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata. Fasilitas sosial merupakan

salah satu komponen penting dalam perencanaan tata ruang kawasan permukiman maupun perkotaan.

Tabel 3.3 Fasilitas Sosial dan Kesehatan di Jawa Tengah 2024

No.	Kabupaten/ Kota	Pendidikan (unit)				Kesehatan (unit)				
		SD	SMP	SMA	Per guran Tinggi	Ru mah Sakit	Poliklinik	Pusk esmas	Puske smas Pembantu	Apote k
1	Cilacap	284	167	66	12	11	72	38	73	122
2	Banyumas	331	151	55	24	22	67	41	36	189
3	Purbalingga	239	99	26	4	9	19	22	44	68
4	Banjarnegara	278	113	26	4	4	14	35	39	61
5	Kebumen	457	152	46	10	11	30	35	69	111
6	Purworejo	396	78	28	8	11	20	27	58	62
7	Wonosobo	265	133	39	4	5	26	24	41	48
8	Magelang	369	151	54	7	7	30	27	59	84
9	Boyolali	267	107	38	4	11	29	26	33	89
10	Klaten	399	120	29	8	14	69	35	82	142
11	Sukoharjo	167	72	35	14	9	47	12	51	100
12	Wonogiri	294	112	26	4	8	35	36	127	64
13	Karanganyar	177	79	21	12	8	51	23	56	91
14	Sragen	208	90	30	3	9	67	25	49	96
15	Grobogan	280	160	65	5	9	46	33	53	126
16	Blora	294	107	29	7	7	27	27	47	56
17	Rembang	274	84	31	5	4	8	17	66	59
18	Pati	404	174	73	9	12	47	29	41	133
19	Kudus	131	82	47	10	10	39	19	43	73
20	Jepara	195	140	68	4	7	41	22	46	102
21	Demak	249	149	82	2	5	46	27	45	79
22	Semarang	235	108	38	13	6	43	26	66	65
23	Temanggung	287	95	33	3	4	14	26	37	54
24	Kendal	285	118	44	10	6	48	30	48	84
25	Batang	248	93	27	4	3	21	21	39	61
26	Pekalongan	284	98	30	8	5	30	26	43	69
27	Pemalang	223	115	29	4	8	34	25	64	94
28	Tega	287	146	39	9	11	48	29	59	134
29	Brebes	296	165	47	10	13	48	38	61	125
Kota/Municipality										

No.	Kabupaten/ Kota	Pendidikan (unit)				Kesehatan (unit)				
		SD	SMP	SMA	Perguruan Tinggi	Rumah Sakit	Poliklinik	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Apotek
30	Magelang	16	13	12	5	8	7	5	11	13
31	Surakarta	53	41	25	20	15	42	17	21	51
32	Salatiga	23	13	7	9	5	12	6	17	16
33	Semarang	174	129	77	49	29	99	37	35	136
34	Pekalongan	27	20	12	4	8	8	14	18	24
35	Tegal	27	18	9	9	3	11	8	20	22
	Jawa Tengah	8.423	3.692	1.343	314	317	1.295	888	1.697	2.903

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Menurut tabel diatas fasilitas dari persebaran SD dan SMP yang cenderung relatif mengikuti akan sebaran penduduk, akan tetapi untuk jenjang SMA dan perguruan tinggi terjadi ketimpangan yang cukup tinggi. Perguruan tinggi hanya terpusat di Kota Semarang dengan jumlah 49 unit dan Surakarta sebanyak 20 unit, sedangkan pada wilayah kabupaten hanya memiliki 3-5 perguruan tinggi. Kemudian pada sektor kesehatan, dengan fasilitas primer seperti puskesmas yang sudah relatif tersebar merata di setiap kabupaten. Namun, sarana rumah sakit masih tergolong belum merata dengan dominasi berada di Kota Semarang, sedangkan untuk daerah kabupaten seperti Rembang, Banjarnegara, Batang, dan Temanggung yang memiliki jumlah rumah sakit berkisar hanya 3-4 unit dengan kapasitas wilayah tergolong luas dan penduduk yang tidak sedikit.

3.4.2 Fasilitas Ekonomi

Fasilitas ekonomi merupakan sarana dan prasarana guna menunjang kegiatan perekonomian di suatu wilayah yang dikelola pemerintah maupun pihak swasta. Fasilitas ekonomi sebagai aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa yang menjadi penggerak roda perekonomian lokal maupun regional. Fasilitas ekonomi bersifat nirlaba yang berorientasi pada keuntungan dan komersial untuk melayani kepentingan masyarakat luas.

Tabel 3.4 Jumlah Fasilitas Ekonomi di Jawa Tengah

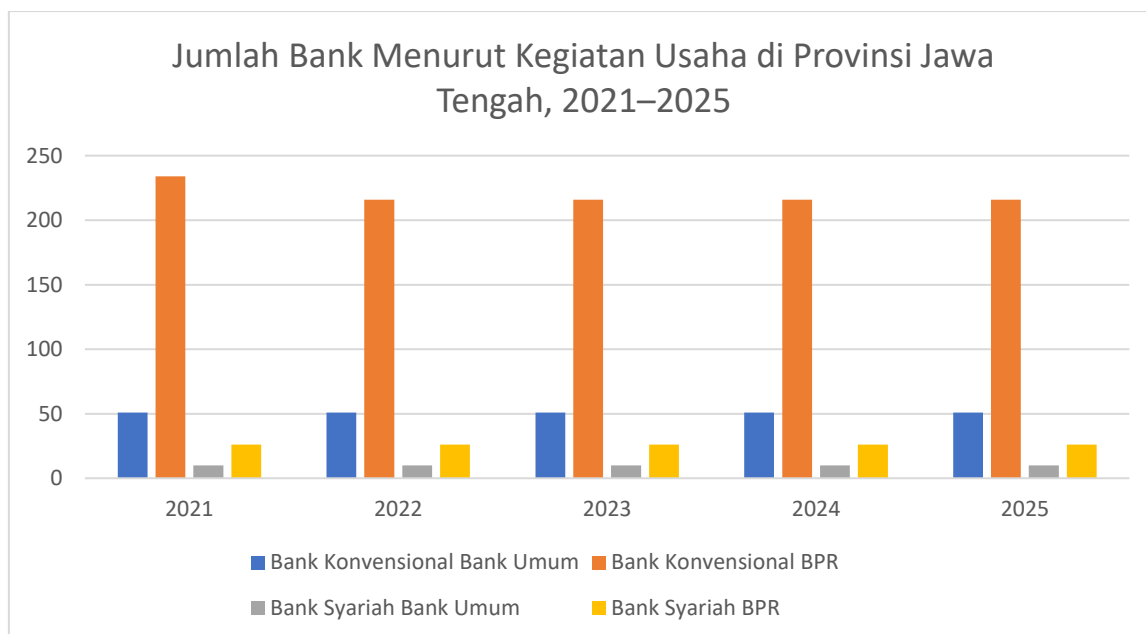
No.	Kabupaten/Kota	Jumlah dalam unit	
		Supermarket	Pasar
1	Kab. Cilacap	190	33
2	Kab. Banyumas	264	28

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah dalam unit	
		Supermarket	Pasar
3	Kab. Purbalingga	71	20
4	Kab. Banjarnegara	75	23
5	Kab. Kebumen	230	41
6	Kab. Purworejo	170	31
7	Kab. Wonosobo	100	21
8	Kab. Magelang	98	19
9	Kab. Boyolali	23	42
10	Kab. Klaten	23	50
11	Kab. Sukoharjo	177	26
12	Kab. Wonogiri	100	26
13	Kab. Karanganyar	82	18
14	Kab. Sragen	140	45
15	Kab. Grobogan	192	18
16	Kab. Blora	90	14
17	Kab. Rembang	92	15
18	Kab. Pati	151	20
19	Kab. Kudus	146	25
20	Kab. Jepara	114	21
21	Kab. Demak	141	18
22	Kab. Semarang	207	35
23	Kab. Ternanggung	106	21
24	Kab. Kendal	129	13
25	Kab. Batang	167	14
26	Kab. Pekalongan	100	12
27	Kab. Pemalang	134	17
28	Kab. Tegal	77	25
29	Kab. Brebes	80	27
30	Kota Magelang	30	5
31	Kota Surakarta	46	44
32	Kota Salatiga	50	14
33	Kota Semarang	314	54
34	Kota Pekalongan	102	11
35	Kota Tegal	58	14
Total		4.269	860

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Berdasarkan tabel diatas ketersediaan fasilitas ekonomi di Provinsi Jawa Tengah yang tercatat sebanyak 4.269 unit dan jumlah supermarket sebanyak 860 unit pasar yang telah tersebar di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Dominasi supermarket dan pasar berada di Kota Semarang dengan jumlah total 314 unit, sedangkan di Kabupaten Klaten dan Sragen tinggi pada fasilitas pasar dengan masing-masing berjumlah 50 dan 45 unit. Jumlah

dengan rasio antara *supermarket* dan pasar dengan perbandingan 5:1 lebih tinggi unit supermarket yang menandakan ritel secara modern telah menyebar secara masif di Provinsi Jawa Tengah.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Gambar 3.4.1 Jumlah Bank Menurut Kegiatan Usaha di Jawa Tengah

Berdasarkan data diatas bahwa perkembangan jumlah bank di Provinsi Jawa Tengah di tahun 2021-2025, dominasi struktur perbankan berupa Bank Konvensional BPR dengan jumlah unit 214 hingga 234 unit. Terlihat mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun 2022 dikarenakan adanya proses konsolidasi industri. Bank Konvensional berupa Bank Umum terlihat dengan jumlah yang cukup stabil di angka 50 unit, sementara untuk Bank Syariah berupa Bank Umum serta Bank Syariah BPR tercatat masing-masing berjumlah 11 dan 26 unit tanpa adanya perubahan. Kondisi ini mencerminkan akan perkembangan fasilitas perbankan di Jawa Tengah lebih condong stagnan secara kuantitas, dengan dominasi kuat pada sektor konvensional yang belum diimbangi oleh pertumbuhan layanan keuangan syariah secara proporsional.

3.5 Arahkan Pengembangan Kewilayahan dari RTRWP Jawa Tengah

Pada RTRWP Jawa Tengah Tahun 2024 - 2044 pengembangan Provinsi Jawa Tengah diarahkan pada pada struktur ruang dan pola ruang yang dikelompokkan dari Kabupaten/Kota yang memiliki keterkaitan pengembangan dari secara aspek fisik alam, sosial, ekonomi, dan atau budaya sebagai dasar dari koordinasi pembangunan dan kesatuan pengembangan pada wilayah antar Kabupaten/Kota. Arahkan yang difokuskan pada

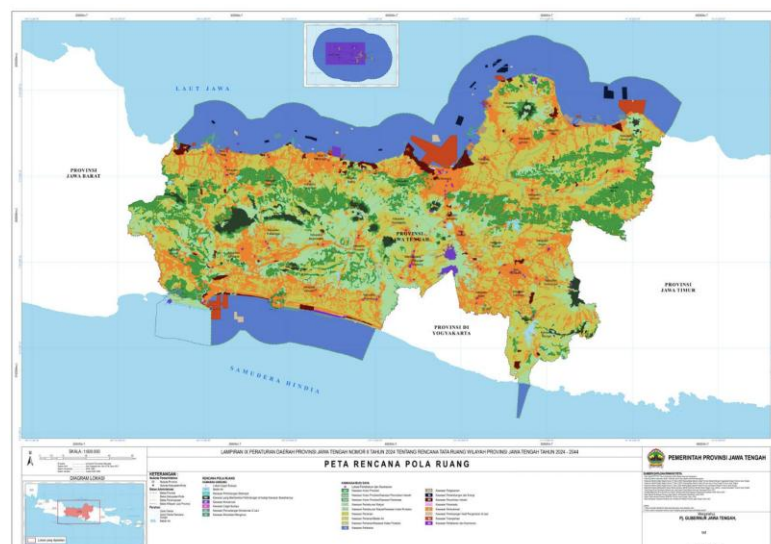
pengembangan struktur dan pola ruang diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan keterpaduan antar wilayah melalui sinergitas pembangunan di setiap Kabupaten/Kota yang selaras dengan potensi dari aspek isik, sosial, ekonomi, dan budaya masing-masing daerah sebagai upaya mewujudkan pembangunan Jawa Tengah yang merata dan berkelanjutan. Rencana struktur ruang dan pola ruang di Jawa Tengah ini dituangkan dalam peta rencana sebagai berikut.



Sumber: RTRW Provinsi Jawa Tengah 2024 - 2044

Gambar 3.5.1 Peta Rencana Struktur Ruang Jawa Tengah 2024 - 2044

Dan berikut peta Pola Ruang Jawa Tengah



Sumber: RTRW Provinsi Jawa Tengah 2024 - 2044

Gambar 3.5.2 Peta Rencana Pola Ruang Jawa Tengah 2024 - 2044

3.5.1 Arahan Pengembangan Sistem Pusat Pelayanan

Berdasarkan RTRWP Jawa Tengah Tahun 2024 - 2044, rencana pengembangan perkotaan dan pedesaan diarahkan pada dua hal utama yaitu peningkatan keterikatan antar pusat pelayanan yang meliputi Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Pusat pelayanan tersebut sebagai penghubung aliran barang, jasa, manusia, dan informasi yang dapat bergerak secara optimal dari lingkup terkecil hingga skala nasional secara berjenjang. Kemudian untuk mendorong kawasan perkotaan dan juga pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan secara efektif dalam pengembangan wilayah yang disekitarnya sehingga perkembangan tidak hanya di wilayah sendiri, namun mampu menjadi penggerak bagi daerah sekitarnya (*hinterland*) melalui penyebaran manfaat investasi, pelayanan, dan pertumbuhan ekonomi secara merata.

Berdasarkan analisis yang dilakukan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Jawa Tengah berada pada Kawasan Kedungsepur (Kendal, Demak, Ungaran, Semarang, Salatiga, Purwodadi), Kawasan Perkotaan Surakarta, Kawasan Perkotaan Cilacap. Kemudian pada Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) berada pada Kawasan perkotaan Purwokerto, Kebumen, Wonosobo, Boyolali, Klaten, Cepu, Kudus, Magelang, Pekalongan, dan Tegal. Kemudian pada Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berada pada Kabupaten Cilacap meliputi Kawasan Perkotaan Kroya, Kawasan Perkotaan Majenang, dan Kawasan Perkotaan Sidareja. Kabupaten Banyumas meliputi Kawasan Perkotaan Wangon, Kawasan Perkotaan Ajibarang, Kawasan Perkotaan Sokaraja, Kawasan Perkotaan Banyumas, dan Kawasan Perkotaan Sumpiuh. Kabupaten Purbalingga meliputi Kawasan Perkotaan Purbalingga dan Kawasan Perkotaan Bobotsari, sedangkan Kabupaten Banjarnegara meliputi Kawasan Perkotaan Banjarnegara dan Kawasan Perkotaan Klampok. Kabupaten Kebumen meliputi Kawasan Perkotaan Gombong-Karanganyar dan Kawasan Perkotaan Prembun, sementara Kabupaten Purworejo meliputi Kawasan Perkotaan Purworejo dan Kawasan Perkotaan Kutoarjo. Kabupaten Wonosobo berupa Kawasan Perkotaan Kertek, sedangkan Kabupaten Magelang meliputi Kawasan Perkotaan Mungkid, Kawasan Perkotaan Muntilan, Kawasan Perkotaan Mertoyudan, Kawasan Perkotaan Secang, dan Kawasan Perkotaan Borobudur. Kabupaten Boyolali meliputi Kawasan Perkotaan Banyudono, Kawasan Perkotaan Ampel, Kawasan Perkotaan Karanggede, dan Kawasan Perkotaan Simo, sementara Kabupaten Klaten meliputi Kawasan Perkotaan Delanggu dan Kawasan Perkotaan Prambanan. Kabupaten Sukoharjo meliputi Kawasan Perkotaan Sukoharjo, Kawasan Perkotaan Kartasura, dan

Kawasan Perkotaan Grogol, sedangkan Kabupaten Wonogiri meliputi Kawasan Perkotaan Wonogiri dan Kawasan Perkotaan Pracimantoro. Kabupaten Karanganyar meliputi Kawasan Perkotaan Karanganyar dan Kawasan Perkotaan Colomadu, sementara Kabupaten Sragen meliputi Kawasan Perkotaan Sragen dan Kawasan Perkotaan Gemolong. Kabupaten Grobogan meliputi Kawasan Perkotaan Purwodadi, Kawasan Perkotaan Gubug, dan Kawasan Perkotaan Godong, sedangkan Kabupaten Blora meliputi Kawasan Perkotaan Blora dan Kawasan Perkotaan Randublatung. Kabupaten Rembang meliputi Kawasan Perkotaan Rembang dan Kawasan Perkotaan Lasem, sementara Kabupaten Pati meliputi Kawasan Perkotaan Pati, Kawasan Perkotaan Juwana, dan Kawasan Perkotaan Tayu. Kabupaten Jepara meliputi Kawasan Perkotaan Jepara, Kawasan Perkotaan Kalinyamatan, dan Kawasan Perkotaan Bangsri, sedangkan Kabupaten Demak meliputi Kawasan Perkotaan Demak dan Kawasan Perkotaan Mranggen. Kabupaten Semarang meliputi Kawasan Perkotaan Ungaran dan Kawasan Perkotaan Ambarawa, sementara Kabupaten Temanggung meliputi Kawasan Perkotaan Temanggung dan Kawasan Perkotaan Parakan. Kabupaten Kendal meliputi Kawasan Perkotaan Kendal, Kawasan Perkotaan Boja, Kawasan Perkotaan Kaliwungu, Kawasan Perkotaan Weleri, dan Kawasan Perkotaan Sukorejo, sedangkan Kabupaten Batang meliputi Kawasan Perkotaan Batang, Kawasan Perkotaan Limpung, dan Kawasan Perkotaan Gringsing-Banyuputih. Kabupaten Pekalongan meliputi Kawasan Perkotaan Kajen, Kawasan Perkotaan Wiradesa, dan Kawasan Perkotaan Kedungwuni-Buaran, sementara Kabupaten Pemalang meliputi Kawasan Perkotaan Pemalang, Kawasan Perkotaan Comal, Kawasan Perkotaan Randudongkal, Kawasan Perkotaan Belik, dan Kawasan Perkotaan Moga. Kabupaten Tegal meliputi Kawasan Perkotaan Slawi-Adiwerna dan Kawasan Perkotaan Lebaksiu Balapulang, sedangkan Kabupaten Brebes meliputi Kawasan Perkotaan Brebes, Kawasan Perkotaan Losari, Kawasan Perkotaan Ketanggungan-Kersana, dan Kawasan Perkotaan Bumiayu.

Sistem Pusat Pelayanan tersebut merupakan bagian dari rencana struktur ruang Provinsi Jawa Tengah. Pengarahan pengembangan difokuskan dalam penyusunan program Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, peraturan zonasi, serta rencana pengendalian kegiatan komersial/perdagangan.

3.5.2 Arahan Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Wilayah

Arahan pengembangan berdasarkan RTRWP Jawa Tengah Tahun 2024-2044 menjelaskan jaringan sarana dan prasarana menjadi fokus khusus bagi program Jawa Tengah

hal ini tertuang dalam indikasi program utama dalam pemanfaatan ruang dimana perwujudan dari rencana struktur ruang wilayah ini meliputi :

1. Sistem pusat permukiman diarahkan dalam membentuk hierarki pusat pelayanan yang terhubung mulai dari skala nasional hingga lingkup terkecil, sehingga wilayah dapat terlayani secara maksimal.
2. Sistem jaringan transportasi diarahkan dalam pengembangan infrastruktur jalan, kereta api, pelabuhan, dan bandar udara yang menjadi tulang punggung untuk menghubungkan antar wilayah dalam mendukung mobilitas barang, jasa, dan manusia.
3. Sistem jaringan energi diarahkan guna menjamin ketersediaan serta keterjangkauan energi bagi seluruh lapisan masyarakat dan juga di sektor ekonomi Provinsi Jawa Tengah
4. Sistem jaringan telekomunikasi diarahkan guna mendorong pemerataan akses digital dan teknologi informasi sebagai sebuah pondasi.
5. Sistem jaringan sumber daya air diarahkan sebagai konservasi sumber daya air secara terpadu guna mendukung kebutuhan domestik, pertanian, industri, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.
6. Sistem jaringan prasarana lainnya diarahkan untuk menciptakan lingkungan perkotaan dan pedesaan yang sehat dan berkelanjutan dengan sistem pengelolaan limbah, persampahan, dan drainase.